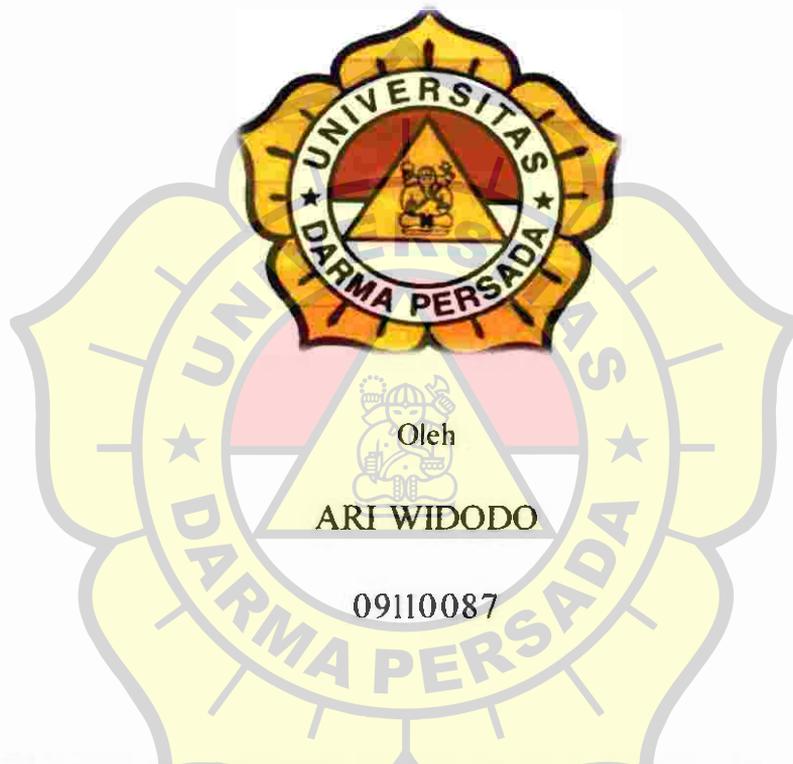


**PERAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX PADA MASA  
PENDUDUKAN MILITER JEPANG 1942-1945**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Sastra



**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA JEPANG**

**FAKULTAS SASTRA**

**UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**JAKARTA**

**2013**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Merupakan karya ilmiah yang penulis susun di bawah bimbingan Ibu Yessy Harun, SS, MPd, bukan merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain. Sebagian atau seluruh isinya sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis sendiri.

Nama : ARI WIDODO

NIM : 09110087

Tanda Tangan :

Tanggal : Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa  
Pendudukan Militer Jepang 1942-1945



## LEMBAR PERSUTUJUAN LAYAK UJI

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : ARI WIDODO  
NIM : 09110087  
Program Studi : Sastra Jepang(S1)  
Judul Skripsi : Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa  
Pendudukan Militer Jepang 1942-1945

Telah disetujui oleh Pembimbing, Pembaca, dan Ketua Jurusan Sastra Jepang untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji pada hari Kamis, 11 Juli 2013 pada program Studi Sastra Jepang Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.

Pembimbing : Yessy Harun, SS, M.Pd (  )

Pembaca : Susi Ong, MA, Ph.D (  )

Ketua Penguji: Dr. Nani Dewi Sunengsih, SS, M.Pd (  )

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji padahari Kamis, tanggal 11 Juli 2013

Oleh

DEWAN PENGUJI

yang terdiri dari :

Pembimbing : Yessy Harun, S.S, MPd (  )

Pembaca : Susi Ong, MA, Ph.D (  )

Ketua Sidang : Dr Nani Dewi Sunengsih, SS, MPd (  )

Ketua Program Studi,

Dekan,

  
Hari Setiawan, M.A

  
Syamsul Bachri, M.Si

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Oleh karena Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pendudukan Militer Jepang 1942-1945” dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan materil maupun moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

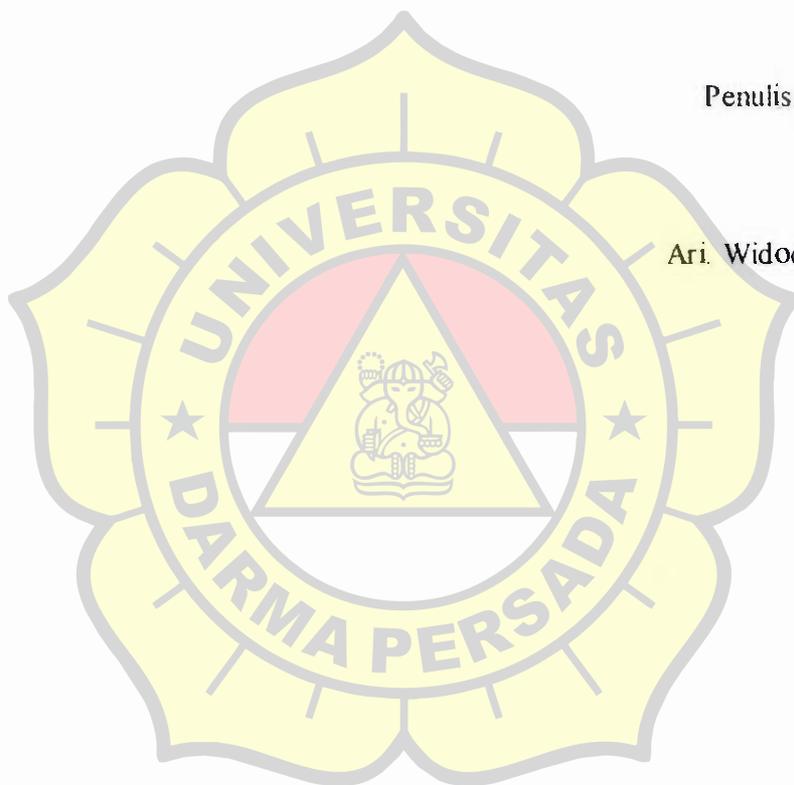
1. Ibu Yessy Harun, SS, M.pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Susi Ong, M.A, Ph.D selaku dosen pembaca yang sedia meluangkan waktu untuk membaca skripsi serta memberikan saran dan masukan.
3. Bapak Hari Setiawan, M.A selaku Ketua Jurusan Sastra Jepang SI, Universitas Darma Persada.
4. Bapak Syamsul Bachri, SS, M.Si dosen pembimbing akademik dan selaku Dekan Fakultas Sastra, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama masa perkuliahan sampai masa pembuatan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, kakak dan adik tercinta, adik sepupu Anis Miarti, Mbah Putri serta keluarga yang membantu selama penulis berada di Yogyakarta yang telah memberikan perhatian dan dukungan doa.
6. Kanjeng Gusti Pangeran Harya Prabokusumo dan K.P.H Ninotokusumo, yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian di Perpustakaan Keraton Yog yakarta Tepas Banjarwilapa
7. Bapak K.R.T. H.Jatiningrat, SH, Bapak Pawiro Diarjo, dan Bapak Sumarjiman, yang telah memberikan informasi untuk penulis sebagai narasumber dalam skripsi yang penulis susun.

8. Teman-teman Unsada Photography Club, Tarung Derajat, Taradhika dan sahabat-sahabat penulis yang memotivasi dan menghibur hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Harapan penulis adalah untuk dapat memberikan manfaat bagi yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis,

Ari. Widodo



## ABSTRAKSI

Nama : ARI WIDODO

Program Studi : Sastra Jepang

Judul : Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pendudukan  
Militer Jepang 1942-1945

Sripsi ini membahas tema Pendudukan Militer Jepang dengan menggunakan metode historis dan penelitian kepustakaan serta wawancara dari para narasumber yang pernah merasakan masa Pendudukan Militer Jepang di Yogyakarta. Dengan mengangkat kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang pada saat itu seorang pemimpin kota Yogyakarta, kekuasaan pemerintahan militer Jepang yang ingin menguasai Yogyakarta. Kebijakan Sri Sultan Hamenngku Buwono IX untuk petani pada khususnya serta penduduk Yogyakarta pada umumnya dalam hal pertanian, serta konstribusi Sri Sultan Hamengku Buwono IX terhadap keamanan rakyat Yogyakarta terhadap pendudukan militer Jepang.

Kata kunci:

Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada masa kekuasaan militer Jepang dan konstribusi Sri Sultan Hamengku Buwono IX terhadap keamanan Rakyat Yogyakarta

がいよう  
概要

しめい  
氏名 : アリ・ウ・ネド

こぶく  
項目 : 日本語学科

題名 : 日本軍政期 (1942-1945) におけるスルタン・ハメンクブラ  
ノ九世の役割

ほんろんぶん  
本論文において、日本軍政期のジョグジャカルタの歴史を取り上げ、  
しりょうしゅうしゅう  
史料収集と、日本軍政期を体験した地元の年寄りへのインタビューを行  
いました。

日本軍政期のジョグジャカルタにおいて、サルタンは日本占領軍と巧みに  
こうしょう  
交渉し、占領軍の政策に協力しながら、ジョグジャカルタの農業生産  
こうじょう  
の向上と治安の改善を図り、結果的には民衆の生活改善に寄与しました。

キーワード: 日本軍政期のジョグジャカルタにおけるスルタン・ハメンク  
ブラノ九世のリーダーシップと地元の民衆の福利厚生に対する貢献

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN LAYAK UJI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
概要.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Landasan Teori.....	6
1.5 Perumusan Masalah.....	12
1.6 Tujuan Penelitian.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	12
1.8 Manfaat Penelitian.....	13
1.9 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II SEKILAS SEJARAH YOGYAKARTA HINGGA MULAINYA MASA PENDUDUKAN MILITER JEPANG	
2.1 Sejarah Kesultanan Yogyakarta.....	14

2.1.1 Pemimpin Kota Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX.....	20
2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Yogyakarta.....	22
2.1.3 Sri Sultan Hamengku Buwono IX naik tahta.....	25
BAB III SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO IX dan PEMERINTAHAN MILITER JEPANG di YOGYAKARTA 1942-1945	
3.1 Pendudukan Jepang di Kota Yogyakarta 1942-1945.....	30
3.1.1 Hubungan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan militer Jepang.....	44
3.1.2 Susunan Birokasi Yogyakarta pada masa pendudukan militer Jepang.....	49
3.1.3 Kebijakan-kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX terhadap militer Jepang.....	55
3.1.4 Hasil wawancara dengan penduduk Yogyakarta yang pernah merasakan pendudukan militer Jepang.....	59
BAB IV KESIMPULAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
GLOSSARY	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beraneka ragam bahasa, budaya, dan sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang sangat berlimpah dan sumber daya manusia yang memadai di Indonesia, sangat di inginkan oleh para penjajah terutama penjajah Jepang.

Pada bulan Februari 1942, armada laut Jepang melumpuhkan armada gabungan sekutu dalam pertempuran laut Jawa, pasukan Jepang kemudian menyerbu pulau Jawa dan menjumpuhkan perlawanan pasukan sekutu di pulau Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal H. Poorten, panglima KNIL, terpaksa menandatangani penyerahan seluruh pasukan KNIL dan sekutu kepada Letnan Jenderal Imamura Hitoshi. Dengan demikian, Indonesia jatuh ketangan Jepang.

pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia disambut kegembiraan oleh penduduk Indonesia, yang menganggap mereka sebagai pembebas, namun ternyata Jepang sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia. Jepang membagi Indonesia menjadi tiga zona pendudukan, yaitu Tentara ke-25 menduduki Sumatera, Tentara ke-16 menduduki Jawa dan Madura, sementara sisa wilayah Indonesia dikuasai oleh angkatan laut.

Setelah Jepang berhasil menduduki wilayah-wilayah penghasil minyak Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan, Tentara Ke-16 di bawah komando Letjen Hitoshi Imamura mulai bergerak untuk merebut pulau Jawa. Saat itu, Imamura membawa Divisi Ke-2 dibawah komando Mayjen Maruyama Masao, Divisi Ke-38 di bawah komando Mayjen Sano Tadayoshi, Divisi Ke-48 dibawah komando Mayjen Tsuchihashi Yuetsu, dan Detasemen Sakaguchi di bawah komando Mayjen Sakaguchi Shikan.

Untuk merebut Pulau Jawa, Letnan Hitoshi Imamura memerintahkan Mayjen Maruyama Masao, Panglima Divisi Ke-2 dan Detasemen Shoji dari Divisi Ke-38

untuk menduduki Jawa Barat, baik Letjen Hitoshi Imamura maupun Mayjen Okazaki Seizaburo, Kepala Staf Tentara Ke-16, bersama-sama dengan Divisi Ke-2 meninggalkan Singapura menuju Jawa Barat. Mereka dikawal armada laut Jepang di bawah komando Laksamana Madya Takahashi Ibo. Dilaut Jawa, dihadap Angkutan Laut Hindia Belanda dibawah komando Laksamana Muda Karel Doorman.

Pada tanggal 1 Maret 1942, sebagian Divisi Ke-2 Tentara Ke-16 Angkatan Darat Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di Teluk Banten. Selain Divisi Ke-2, kesatuan lain yang bertugas merebut Jawa Barat adalah Detasemen Shoji dari Divisi Ke-38 dibawah komando Kolonel Tasyinari Shoji.

Letjen Imamura memerintahkan Divisi Ke-48 Tentara Ke-16 Angkatan Darat Jepang untuk merebut Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, Detasemen Shakaguchi diperintahkan untuk bergabung dengan Divisi Ke-48 setelah sebelumnya berhasil merebut Tarakan, Balikpapan dan Banjarmasin. Mereka berhasil mendarat di Kragan, Jawa Tengah pada tanggal 5 Maret 1942. Divisi Ke-48 kemudian bergerak ke arah timur dan tanpa perlawanan sejak tanggal 8 Maret 1942, mereka berhasil menguasai Surabaya. Sementara itu, Detasemen Sakaguchi bergerak kearah selatan Jawa Tengah dan pada tanggal 7 Maret 1942 mereka sudah tiba di tepi timur Sungai Serayu, garis pertahanan terakhir pasukan Hindia Belanda. Tanpa perlawanan, Detasemen Sakaguchi akhirnya berhasil menguasai Cilacap sebagai salah satu daerah perhasil minyak di Jawa Tengah bagian selatan.

Pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945 saat itu sedang berperang melawan sekutu yaitu, Amerika, Inggris, Australia, Belanda, dan lain-lain. Pada saat melawan sekutu, pemerintah Jepang meminta bantuan kepada bangsa Indonesia untuk membantu Jepang saat berperang melawan sekutu dengan cara meminta bantuan harta benda, bahan makanan, ternak, bahan pakaian, bahkan emas, intan dan tenaga kerja.

Ketika Jepang menduduki Jawa dalam melawan sekutu, salah satu tujuannya adalah memperoleh sumber-sumber pangan yang memungkinkan mereka meneruskan operasi militer selanjutnya, serta mempertahankan daerah yang telah dikuasainya di Asia Tenggara. Jawa, yang masyarakatnya merupakan masyarakat

penghasil beras, yang setiap tahunnya menghasilkan 8,5 juta ton beras, sangat penting sekali sebagai penunjang kebutuhan militer Jepang.

Tentara Jepang masuk ke Jawa pada bulan Maret 1942, sebagian daerah Jawa sedang menikmati hasil bumi yaitu panen padi. Pada mulanya, Jepang sedemikian sibuknya dalam usaha memulihkan keamanan dan ketentraman sehingga tidak ada kesempatan untuk memulai dengan politik beras mereka. Jepang hanya meneruskan politik Belanda yang memperoleh pemasaran beras dengan memberlakukan pengawasan harga. Para petani masih dapat menyalurkan hasil mereka, dan Jepang membeli beras yang dibutuhkan melalui *Rijist Verkoop Centraal* ( Pusat pembelian beras ) yang ada. (Taufik Abdullah; 87)

Pada bulan Agustus 1942, lima bulan setelah melakukan penyerbuan, *Gunseikanbu* 「ぐんせいかんぶ 軍政監部」 mulai mengambil langkah pertama melakukan pungutan bahan pangan secara sistematis. Pada bulan Agustus 1942 sampai April 1943, dasar-dasar politik beras Jepang sudah ditetapkan, yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Padi berada dibawah pengawasan negara, dan hanya pemerintah yang diizinkan melakukan seluruh proses pemungutan dan penyuluhan padi. Untuk tujuan itu didirikan sebuah badan pengelola pangan yang dinamakan *Shokuryo Kanri Zimusyo* 「しよくかうかりじむじよ 食糧管理事務所」 (SKZ, Kantor Pengelola Pangan) dibawah Departemen Ekonomi *Gunseikanbu* 「ぐんせいかんぶ 軍政監部」. SKZ bertanggung jawab menguasai seluruh proses pembelian dan penjualan padi di bawah monopoli negara, serta menentukan jumlah padi yang akan dibeli pemerintah. SKZ juga bertanggung jawab menentukan harga resmi padi. Pada bulan September 1943 bergabung dalam sebuah organisasi yaitu *Juyobusshi Kodan* 「じゅうぶつしこうだん 重要物資公団」 (Badan Hukum untuk Komoditi Bahan Pangan Pokok). Dalam bulan April 1944, organisasi pangan ini dipisahkan, dan didirikan sebuah organisasi sendiri, *Shoikuryo Kanri Kyoku* 「しよくりょうかんりきょく 食糧管理局」 (Biro Pengelola Pangan ). Baik pengelola penggilingan

padi maupun pedagang tidak diizinkan untuk beroperasi dengan prakarsa sendiri. Penggilingan padi dapat beroperasi hanya sebagai wakil SKZ serta menggiling padi dengan jumlah batasan tertentu, tetapi tidak boleh ikut membeli atau menjual padi. Untuk mengkoordinasikan penggilingan-penggilingan ini, di setiap *Shu* 「州」 didirikan Perserikatan Koperasi Penggilingan Padi ( *Seimaigyo Kumiai*, 「精米業組合」 atau *Beisho Kumiai* 「米商組合」 ). Pedagang padi juga diatur melalui pemerintahan yang bernama *Haikyo Kumiai* 「配給組合」 . Para anggota persatuan ini memperoleh padi dari penggilingan, dan menyalurkannya kepada penduduk di daerah pengaturannya masing-masing.

2. Para petani juga harus menjual hasil produksi mereka kepada pemerintah sebanyak jumlah yang ditentukan dengan harga yang ditetapkan. Padi harus diserahkan kepenggilingan yang ditunjuk melalui pemerintahan desa. Jika ini mempunyai surplus yang dapat dijual, mereka harus menjualnya kepada penggilingan tersebut, serta tidak diizinkan menjual kepada tengkulak.
3. Harga gabah dan beras ditetapkan oleh pemerintah. (Taufik Abdullah; 88)

Di pulau Jawa khususnya di daerah Indramayu merupakan salah satu penanaman padi yang paling penting, dan disebut Gudang Beras Jawa, bersama dengan daerah Kerawang-Bekasi ( Dahulu Jakarta *Shu* 「州」 ) dan daerah Jember-Banyuwangi (Dahulu Besuki *Shu* 「州」 ). Luas keseluruhan *Ken* 「県」 203.652 ha, dan 113.232 ha ( 55% ) diantaranya sawah, selama pendudukan Jepang. Indramayu merupakan satu-satunya *Ken* 「県」 di Jawa, yang dimasa pendudukan Jepang telah terjadi pemberontakan petani besar-besaran menentang penyerahan padi. (Taufik Abdullah; 88)

Penjajah Jepang berhasil menduduki kota Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1942 sampai tanggal 15 Agustus 1945 yang pada saat itu kota Yogyakarta di pimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah seorang pemimpin yang arif, tegas, dan peduli terhadap rakyatnya. Sri Sultan

Hamengku Buwono IX sudah mengetahui maksud dan tujuan Jepang datang ke Kota Yogyakarta selain untuk merampas hasil panen padi dan ingin menjadikan rakyat Yogyakarta sebagai romusha untuk keperluan Jepang.

Dengan kepandaiannya dan kepeduliannya terhadap rakyatnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat mengelabui pihak Jepang dan memanfaatkan Jepang untuk kepentingan kota Yogyakarta sendiri. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat mengelabui pihak Jepang agar rakyat tidak memberikan hasil panen padi kepada Jepang dengan membuat daftar rincian hasil panen yang di buat seminim mungkin di karenakan faktor alam yang bilamana musim hujan terjadi banjir dan di musim kemarau terjadi kekeringan sehingga tidak dapat memberikan hasil bumi yang mak simal terhadap Jepang.

Dipihak Jepang pun dapat memaklumi keadaan Yogyakarta yang telah di jelaskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan hasil panen yang seperti itu, namun disisi lain pihak Jepang mengeluarkan dana yang cukup besat untuk merubah hasil panen berupa padi di Yogyakarta agar bisa memberikan hasil panen ke pada Jepang lebih banyak secara maksimal, pihak Jepang akhirnya membuat proyek pengairan di Yogyakarta yang dinamakan bendungan *Gunsei Hasuiro* ぐんせいはいすいろ 「軍政排水路」, sedangkan rakyat menamakan *Selokan Mataram*. Namun, dibalik itu ada hasil positif lainnya yang jauh lebih penting. Dengan dalih proyek di Yogyakarta sendiri memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat menolong ribuan penduduk Yogyakarta dari penderitaan menjadi romusha di zaman pendudukan Jepang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin membuat penelitian pendudukan Jepang di kota Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada masa pendudukan militer Jepang 1942-1945”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi pendudukan Jepang, yang pada awalnya ingin melindungi rakyat Indonesia, namun

di sisi lain keberadaan Jepang hanya ingin menguasai hasil bumi di wilayah Indonesia yaitu Jawa, khususnya Yogyakarta dan Indramayu, Sumatera, Palembang, Kalimantan, Balikpapan dan Tarakan, khususnya ingin menguasai hasil panen padi di kota Yogyakarta pada tahun 1942-1945.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membatasi masalah panen hasil bumi di Yogyakarta, khususnya padi yang ingin dikuasai Jepang sehingga membuat pemimpin Yogyakarta saat itu yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX membuat suatu kebijakan terhadap Jepang.

### 1.4 Landasan Teori

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang penelitian tersebut, landasan teori inimerupakan untuk mencari jawaban mengenai pertanyaan penelitian, yaitu berkuasanya Jepang di Yogyakarta pada tahun 1942-1945. Untuk memperkuat penulisan, penulis menggunakan teori kekuasaan dan teori kebebasan.

Secara umum kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja, maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi, walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat, justru karena pembagian yang tidak merata itu timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Dalam buku Soerjono Soekanto, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan, adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau kerana terpaksa. (Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi; 337)

Hak milik kebendaan dan kedudukan merupakan sumber kekuasaan. Birokasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, di samping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Pada umumnya kekuasaan yang tertinggi berada pada organisasi yang disebut dengan Negara.

Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah, agar yang di perintah patuh dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Max Weber mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. (Max Weber, 180)

Ada beberapa unsur pokok dalam menjalankan kekuasaan agar dapat menguasai penguasa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasa takut

Perasaan takut pada seseorang menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti. Rasa takut merupakan perasaan negatif karena seseorang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa.

2. Kepercayaan

Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif.

Penjajah memiliki berbagai macam bidang agar dapat menguasai suatu negara untuk dikuasai, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Militer

Dengan menggunakan bidang militer, penguasa akan lebih banyak menggunakan paksaan (*coercion*), serta kekuatan militer (*military force*) didalam melaksanakan kekuasaannya. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri

masyarakat sehingga mereka tunduk kepada kemauan penguasa atau kelompok orang-orang yang dianggap sebagai penguasa.

## 2. Bidang Ekonomi

Dengan menggunakan bidang ekonomi, penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat. Dengan jalan menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat tersebut, penguasa dapat melaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan perintah-perintahnya dengan dikenakan sanksi-sanksi yang tertentu.

## 3. Bidang Politik

Melalui politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Caranya adalah, antara lain, dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan yang sah.

Kekuasaan yang telah dilaksanakan dengan berbagai unsur dan dengan berbagai bidang memerlukan serangkaian cara atau usaha-usaha untuk mempertahankannya. Setiap pengusaha yang telah memegang kekuasaan didalam masyarakat, demi stabilnya masyarakat tersebut, akan berusaha untuk mempertahankannya. Cara-cara atau usaha-usaha yang dapat dilakukannya adalah antara lain:

1. Dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa, dimana peraturan-peraturan tersebut akan digantikan dengan peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa, keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu ada pergantian kekuasaan dari seseorang penguasa kepada penguasa lain (yang baru).
2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan (*belief-systems*) yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya, yang meliputi agama dan ideologi.
3. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik.

Dalam kekuasaan dalam negara atau pemerintahan, ingin melepaskan kekuasaan tersebut dan mengharapkan suatu kebebasan dalam negara atau pemerintahan, kebebasan dalam arti khusus adalah tiadanya paksaan, halangan atau beban, baik orang perorangan maupun bangsa, merasa terdorong oleh kecenderungan yang tiada habisnya untuk melaksanakan diri, tujuan kecenderungan ini adalah kemerdekaan, otonomi, dan kedewasaan. Harapan kepribadian yang merdeka dan berdiri sendiri inilah yang diartikan sebagai "Kebebasan" dalam arti yang luhur. Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia adalah kepribadian atau kemandirian yang sifatnya sedemikian rupa sehingga terbebas dari beraneka ragam alienasi yang menekannya, dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tak tercela, berdikari dan kreatif.

Dalam buku, Pemikiran Soedjatmoko tentang Kebebasan, Soedjatmoko mengemukakan gagasannya tentang kebebasan dan kemerdekaan. Ia menulis bahwa kebebasan dan kemerdekaan memaksa untuk menerima tanggung jawab terhadap krisis tersebut. Kebebasan dan kemerdekaan sebagai akibat dari revolusi (Soedjatmoko; 8)

Revolusi pada hakekatnya merupakan suatu jangkauan untuk menentukan nasib sendiri yang lahir dari keinginan untuk turut aktif dalam sejarah, dari kepercayaan bahwa memiliki kesanggupan untuk menjajarkan diri dengan bangsa-bangsa di dunia, dan dari keyakinan untuk mewujudkan kepribadian sebagai bangsa. Oleh karena itu sesungguhnya perebutan kemerdekaan itu berarti penerebosan terhadap makna hidup baru, suatu penerimaan terhadap historisitas, keperluan, kemungkinan dan keinginan untuk berikhtiar dan campur tangan secara aktif dalam hidup di dunia demi kehidupan yang baik.

Kebebasan sebagai kebutuhan dasar manusia, kebebasan tersebut merupakan suatu kebutuhan dasar yang khas manusia, yang memiliki kaitan dengan kemampuan berdiri sendiri. Kehidupan manusia secara individual dan kolektif berputar dan bergerak antara dua kepentingan fundamental yaitu disuatu pihak mencari kebenaran, kebebasan batin untuk kesempurnaan kepribadian seseorang untuk untuk penebusan jiwa, pada pihak lain mencari suatu masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu

kebebasan merupakan kebutuhan dasar dan kepentingannya bersifat fundamental, sehingga manusia memiliki kesanggupan intrinsik untuk hidup bebas.

Perjuangan demi kebebasan, martabat, dan hak-hak manusia dinegara-negara berkembang akan bergantung pada rakyat dinegara-negara itu yang memiliki komitmen untuk membangun masyarakat yang bebas, terbuka dan adil, yang berkeras bahwa kebebasan hendaknya menjadi sasaran pembangunan, sederajat dan sama tujuan akhirnya dengan sasaran-sasaran pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, yang berkeras bahwa setiap langkah ditempuh, tiap keputusan dalam pembangunan diuji dengan sejauh mana usaha itu dapat memajukan atau mengurangi kondisi-kondisi sosial bagi kebebasan. (Soedjatmoko; 104)

Kebebasan-kebebasan Demokratis merupakan kebebasan berpikir, bertempat tinggal dan berpindah, kebebasan berhimpun, kebebasan beragama, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Pentingnya kebebasan demokratis ini diungkapkan oleh Bung Hatta ketika menyambut sewindu surat kabar "Indonesia Raya". Pada kesempatan itu Bung Hatta berkata:

"Delapan tahun sebenarnya belum berarti dalam usia surat kabar. Di negeri-negeri lain ada surat kabar yang telah beratus tahun umurnya. Tapi bagi "Indonesia Raya" usia delapan tahun pada akhir tahun 1957 ini mengandung arti sendiri. Ini menunjukkan bahwa ia lahir sebagai pembawa negara Indonesia yang kemerdekaannya dan kedaulatannya diakui dunia internasional. Dengan lahirnya setelah pemulihan kedaulatan, maka "Indonesia Raya" adalah sebagai simbol suasana politik baru, yang sesuai dengan alam merdeka. Tujuan perjuangan kemerdekaan selain itu dimasa Hindia Belanda bukanlah semata-mata kemerdekaan manusia dari segala penindasan. Manusia Indonesia harus bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan. Ia harus bebas mengeluarkan pendapatnya, ia harus cepat bergerak, menatap hak-hak asasinya seperti yang dijamin oleh UUD. Tujuan Indonesia merdeka ialah demokrasi seluas-luasnya, demokrasi politik maupun ekonomi. Ikut serta membela tujuan itu supaya Indonesia Merdeka menjadi tempat yang bahagia, adalah tugas surat kabar. Sebenarnya tugas semua surat kabar nasional yang jujur dan bertanggung jawab, apakah ia membela politik pemerintah ataukah berdiri di pihak oposisi. Sebab negara yang demokratis itu bukanlah negara yang hanya terdiri dari pemerintah saja, melainkan dari pemerintah dan oposisi. Pemerintah bertindak dengan pengikut dan pendukung dalam parlemen. Oposisi mengawasi supaya tindakan itu jangan menyimpang ke jalan yang sesat. Dalam hal mengawasi tindakan-tindakan pemerintah itu, surat kabar mempunyai peranan yang penting. Tiap-tiap orang bekerja tentu ada berbuat salah. Kewajiban menegur itu pada tempatnya dalam negara demokrasi."(Moctar Lubis; 113-114)

Dalam teks tersebut Bung Hatta menyebutkan berbagai "kebebasan" yang bersifat syarat, baik di bidang fisik (bebas dari penindasan dan kesengsaraan), baik di bidang

ekonomik (bebas dari kemiskinan) dan bidang sosio-politik (bebas mengeluarkan pendapat) yang harus dipenuhi agar kemungkinan-kemungkinan dan bakat-bakat yang ada pada manusia, dapat diaktualkan dalam rangka pelaksanaan diri manusia, baik sebagai orang perorangan maupun sebagai bangsa.

### 1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah masuknya Jepang ke Yogyakarta?
2. Mengapa Jepang menduduki kota Yogyakarta pada tahun 1942?
3. Bagaimana kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk melindungi rakyatnya dari penjajah Jepang pada umumnya dan hasil bumi yang berupa padi pada khususnya?

### 1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang berjudul Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada masa pendudukan militer Jepang 1942-1945 adalah:

1. Ingin mengetahui sejarah masuknya Jepang ke Yogyakarta.
2. Ingin mengetahui alasan Jepang menduduki kota Yogyakarta pada tahun 1942.
3. Ingin mengetahui kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk melindungi rakyatnya dari penjajah Jepang pada umumnya dan hasil bumi yang berupa padi pada khususnya.

### 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Dengan demikian metode yang dipergunakan adalah metode historis yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber sehingga dapat diperoleh fakta sejarah yang otentik dan kredibel pada penelitian Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada masa pendudukan

militer Jepang 1942-1945. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber data tertulis (teks), merupakan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan menginterpretasikan teks serta mewawancarai narasumber yang pernah merasakan masa pendudukan militer Jepang di Yogyakarta. Sumber lainya penulis menggunakan internet sebagai sumber data yang dapat dipercaya.

### **1.8 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk memperdalam pengetahuan mengenai Berkuasanya Jepang di kota Yogyakarta pada tahun 1942-1945. Peneliatian ini, bermanfaat untuk memperbarui pengetahuan dan tidak tertutup untuk penelitian selanjutnya.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, landasan teori, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Menerangkan tentang sejarah kasuttanan Yogyakarta, pemimpin Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX, kondisi sosial ekonomi Yogyakarta, dan Sri Sultan Hamengku Buwono naik tahta.
- BAB III : Menerangkan tentang kependudukan Jepang di Yogyakarta 1942-1945, hubungan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan militer Jepang, susuna birokrasi Yogyakarta pada pendudukan militer Jepang, kebijakan-kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Hasil wawancara dengan penduduk Yogyakarta yang pernah merasakan pendudukan militer Jepang.
- BAB IV : Kesimpulan